

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Memajukan kesejahteraan umum merupakan salah satu tujuan pembangunan nasional Indonesia berdasarkan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, amanat konstitusi sebagaimana termuat dalam Pasal 33 UUD 1945 ayat 4 yang menyatakan bahwa, “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”. Terpenuhiya kebutuhan material, spiritual, dan sosial penduduk negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosial dan ekonominya merupakan kondisi kesejahteraan secara umum. Salah satu kondisi yang dapat menggambarkan kesejahteraan umum di Indonesia adalah berdasarkan tingkat kemiskinan yang ada di Indonesia. Terdapat hubungan negatif antara kesejahteraan umum dengan tingkat kemiskinan. Semakin rendah tingkat kemiskinan menggambarkan semakin tinggi kesejahteraan penduduk.

Menurut Mubyarto (2004) dalam Giovanni R (2018) kemiskinan merupakan suatu keadaan dimana seseorang mengalami kekurangan dalam menjamin kelangsungan hidup dimana penyebabnya antara lain adalah kurangnya kebutuhan dasar seperti pakaian, makanan, tingkat kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang didapat dimana hal ini didasari oleh kurangnya aset dan pendapatan. Keterbatasan

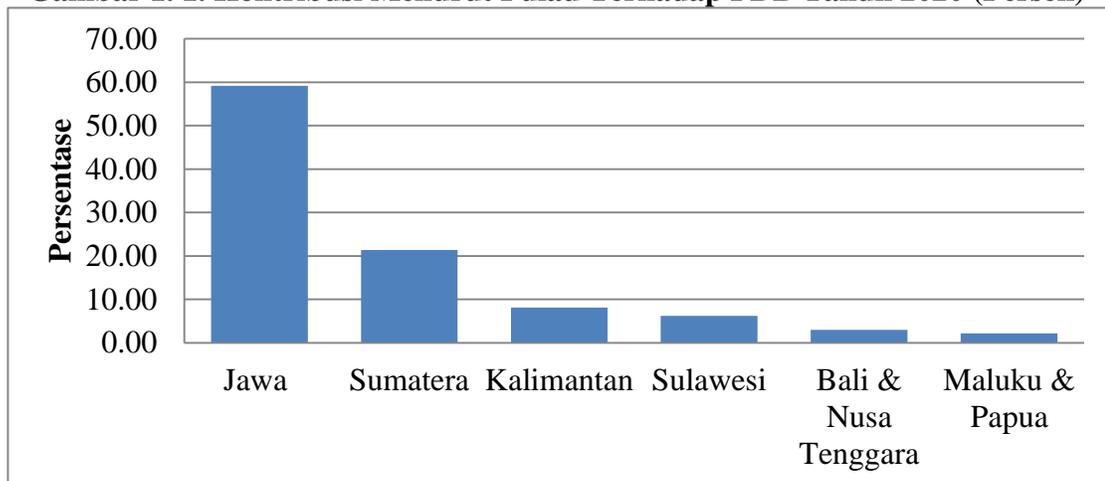
lapangan pekerjaan juga terkait dengan kemiskinan dan orang yang mengalami hal tersebut dikategorikan miskin tidak memiliki pekerjaan.

Melalui pembangunan perekonomian, kemakmuran masyarakat menjadi tujuan dari pada proses pembangunan. Pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi dan tingkat kesenjangan antar penduduk, antar daerah dan antar sektor dapat menjadi tolak ukur dari keberhasilan pembangunan. Selain menciptakan pertumbuhan yang setinggi-tingginya, tujuan utama dari pembangunan ekonomi adalah menghapus atau mengurangi tingkat kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi berdampak pada tingkat pengangguran, semakin baik pertumbuhan ekonomi maka tingkat pengangguran akan semakin menurun. Perubahan pada tingkat pengangguran akan berdampak pula pada tingkat kemiskinan, semakin buruk tingkat pengangguran secara tidak langsung akan memberikan imbas pada penurunan pendapatan masyarakat dimana hal ini menyebabkan kesejahteraan juga ikut menurun sehingga berujung pada meningkatnya kemiskinan (Baihaqi A dan Puspitasari M, 2020).

Indonesia termasuk dalam kategori negara berkembang. Oleh karena itu permasalahan penanganan kemiskinan menjadi pekerjaan utama bagi pemerintah dan menjadi bahan pembelajaran bagi masyarakatnya. Keberhasilan pembangunan ekonomi dilihat dari tingkat kemiskinannya, semakin besar jumlah kemiskinan maka pembangunan ekonomi berkembang kurang baik dan juga sebaliknya. Meningkatnya pemukiman kumuh, pekerja seks komersial, anak jalanan yang kebanyakan adalah anak putus sekolah, tingkat kejahatan dan lain sebagainya merupakan dampak sosial yang ditimbulkan karena kemiskinan (Leonita L dan Sari R, 2020).

Indonesia sendiri terdiri dari 17.504 pulau sehingga dijadikan sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Di mana lima diantara pulau besarnya yakni Pulau Sumatra, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan Pulau Papua, ribuan sisanya adalah pulau-pulau kecil yang tersebar diseluruh wilayah yang membentang dari ujung paling barat (Sabang) sampai ke ujung timur (Merauke/Jayapura). Kontribusi Menurut Pulau Terhadap PDB Tahun 2020 tergambar pada gambar berikut ini:

Gambar 1. 1. Kontribusi Menurut Pulau Terhadap PDB Tahun 2020 (Persen)

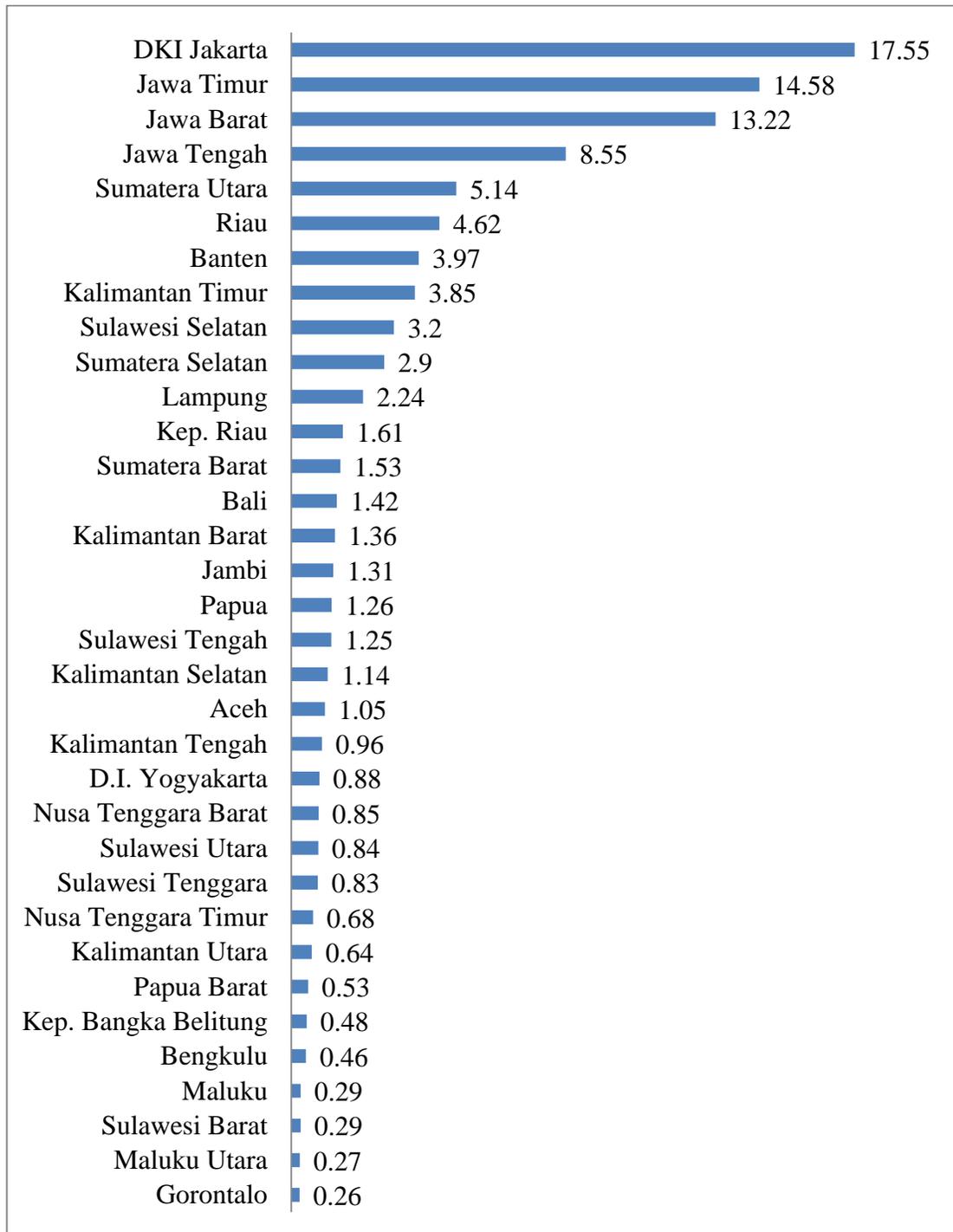


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021 (data diolah)

Struktur perekonomian Indonesia secara spasial di tahun 2020 (Gambar 1.1.), Pulau Jawa masih mendominasi dengan memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yaitu sebesar 59,14%. Diikuti oleh Pulau Sumatera 21,4%, Pulau Kalimantan 8,12%, Pulau Sulawesi 6,19%, Pulau Bali & Nusa Tenggara sebesar 2,95% dan terakhir Pulau Maluku & Papua sebesar 2,2%. Artinya, Pulau Jawa menjadi pusat dari pada pertumbuhan ekonomi nasional, dibanding dengan wilayah lainnya.

Gambar 1. 2. Distribusi PDRB Terhadap Jumlah PDRB Provinsi Tahun 2020

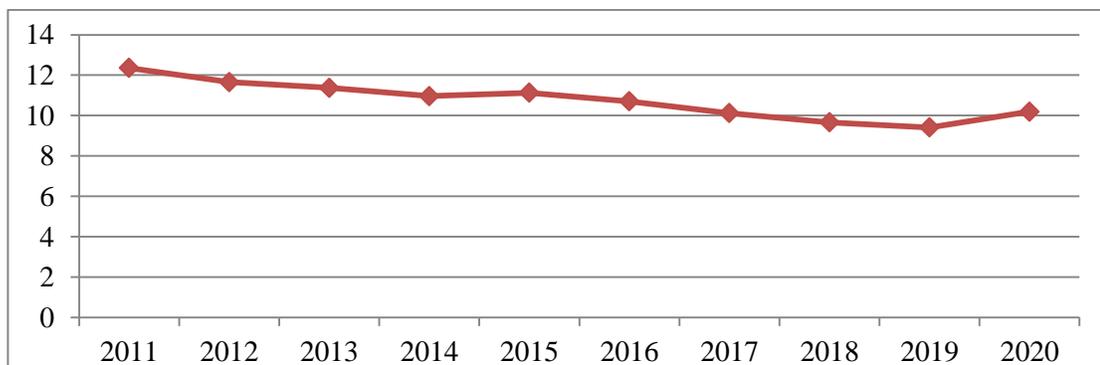
(Persen)



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021 (data diolah)

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pada tahun 2020 lima dari enam provinsi yang ada di Pulau Jawa menempati 6 tertinggi distribusi PDRB di Indonesia. Provinsi DKI Jakarta dengan nilai sebesar 17,55%, Provinsi Jawa Timur dengan nilai sebesar 14,58%, kemudian Provinsi Jawa Barat dengan nilai sebesar 13,22%, selanjutnya Provinsi Jawa Tengah dengan nilai sebesar 8,55%, dan terakhir Provinsi Banten dengan nilai sebesar 3,97%. Hal ini memberikan arti bahwa di Pulau Jawa pertumbuhan ekonomi terjadi dengan sangat baik. Namun, permasalahan perekonomian di sekitar wilayah yang pembangunan ekonominya baik, justru semakin rumit. Kemiskinan adalah salah satu contohnya. Perkembangan tingkat kemiskinan di Indonesia akan digambarkan pada Gambar 1.3 sebagai berikut:

Gambar 1. 3. Tingkat Kemiskinan di Indonesia Tahun 2011-2020 (Persen)



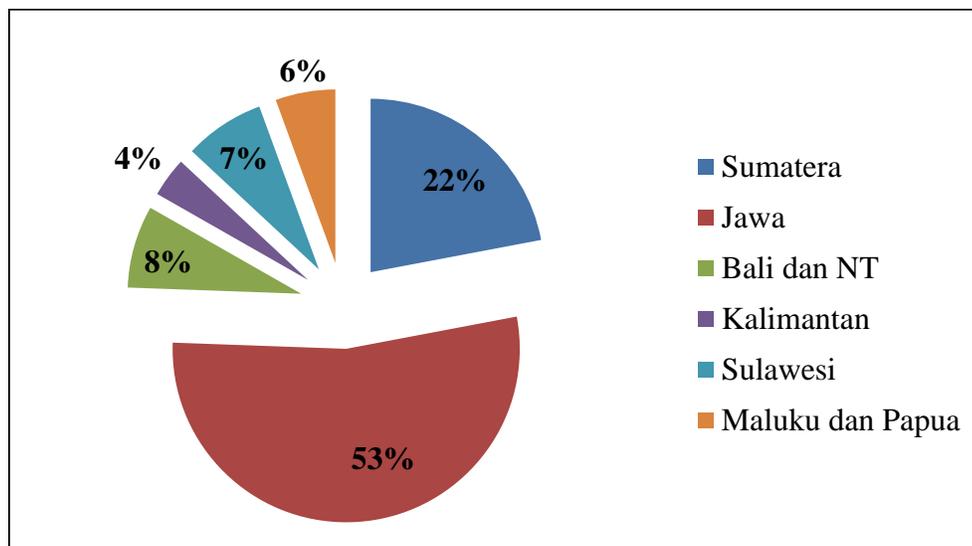
Sumber: BPS Statistik Nasional, 2021 (data diolah)

Pada gambar 1.3. terlihat bahwa permasalahan kemiskinan di Indonesia masih menjadi perhatian yang serius mengingat angka persentasenya masih berada diatas 10%. Tingkat kemiskinan di Indonesia dari tahun 2011-2020 cenderung mengalami penurunan, baik dari jumlah penduduk miskin maupun persentase tingkat kemiskinan. Meskipun dalam grafik mengalami peningkatan pada tahun 2015 yaitu

pada angka 11.13%, naik sebesar 0.17% terhadap persentase kemiskinan pada tahun 2014. Kenaikan tersebut dipacu oleh meningkatnya harga barang kebutuhan pokok akibat dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Selain itu angka persentase pada tahun 2020 berada pada 10,19% yang artinya terjadi kenaikan sebesar 0,78% terhadap tahun 2019 yang disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia.

Hampir semua daerah di Indonesia mengalami masalah kemiskinan, seperti halnya di Pulau Jawa. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia masih dihindangi oleh masalah kemiskinan dimana sejumlah 27,55 juta orang termasuk dalam kategori miskin pada 2020, meningkat 2,76 juta orang terhadap 2019. Sedangkan untuk Pulau Jawa sendiri terdapat 14,75 juta orang miskin pada 2020. Artinya lebih dari Setengahh jumlah penduduk miskin yang ada di Indonesia berada di Pulau Jawa. Keadaan ini akan cenderung ke tahap kronis jika tidak segera ditangani.

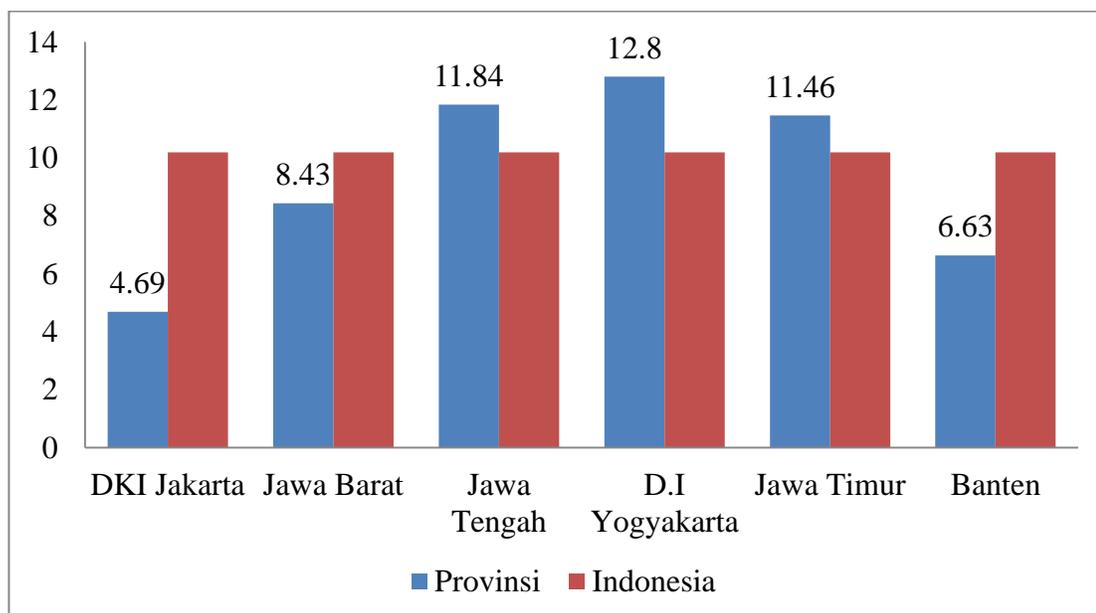
Gambar 1. 4. Persebaran Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 2020 (Persen)



Sumber: BPS Statistik Nasional, 2021 (data diolah)

Pada gambar 1.4. terlihat bahwa persebaran penduduk miskin di Indonesia berpusat di Pulau Jawa dengan proporsi sebesar 53%. Artinya, lebih dari separuh penduduk miskin Indonesia berada di Pulau Jawa. Banyaknya penduduk yang tinggal di Pulau Jawa dan mayoritas persentase tingkat kemiskinan provinsi di Pulau Jawa tergolong tinggi, menjadikan jumlah penduduk miskin di Pulau Jawa tinggi. Berikut merupakan gambaran dari tingkat kemiskinan Provinsi yang ada di Pulau Jawa pada tahun 2020:

Gambar 1. 5. Tingkat Kemiskinan Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2020 (Persen)



Sumber: BPS Statistik Nasional, 2021 (data diolah)

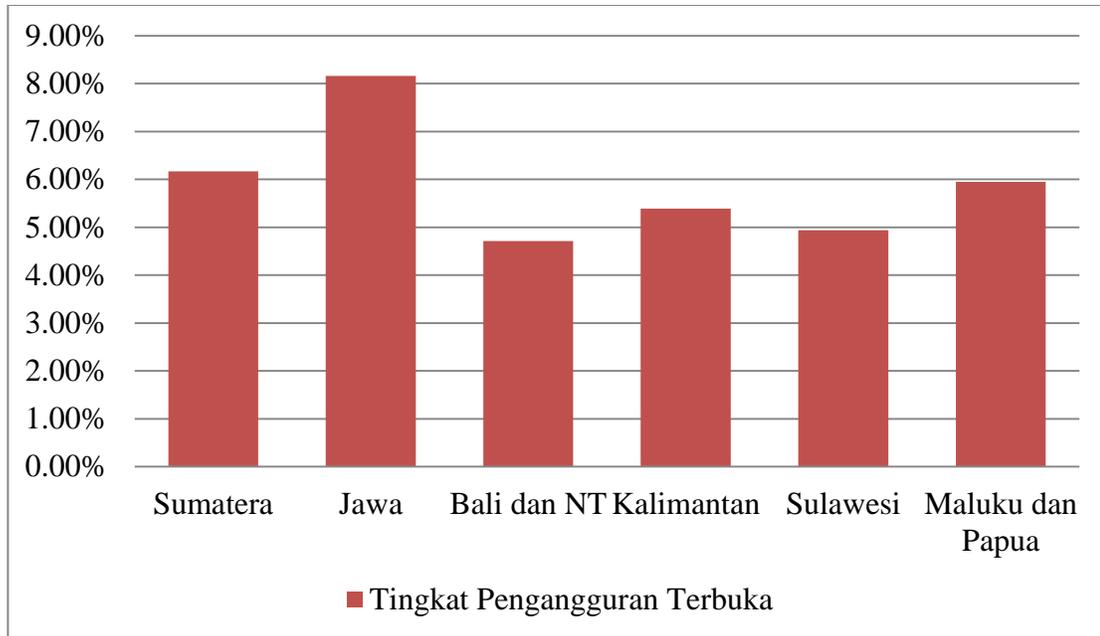
Dari Gambar 1.5. ditemukan fakta selanjutnya bahwa terdapat provinsi dengan persentase kemiskinan di atas persentase nasional pada tahun 2020. Persentase kemiskinan nasional sendiri sebesar 10,19%, sehingga provinsi Jawa Timur dengan 11,46%, provinsi D.I Yogyakarta dengan 12,08%, dan provinsi Jawa Tengah dengan 11,84% telah melampaui persentase kemiskinan secara nasional.

Oleh karena itu, di mana masih perlunya upaya yang lebih kuat lagi bagi pemerintah untuk meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi sehingga dapat berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh terhadap kemiskinan, karena setiap penduduk melakukan transaksi baik itu dalam bentuk barang dan/ jasa menjadi pengaruh yang relative tinggi. Artinya semakin banyak penduduk yang melakukan transaksi baik itu barang ataupun jasa maka sirkulasi perdagangan yang terjadi di daerah mengalami kenaikan, begitu pula sebaliknya. Produktivitas suatu daerah dicerminkan oleh produk domestik, sedangkan tingkat kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari sudut pendapatannya, setelah diperhitungkan aliran pendapatan yang keluar masuk daerah tersebut (Logaritma, S. 2020).

Faktor lain yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di suatu daerah adalah faktor penganggurann. Hal tersebut dikarenakan semakin tinggi tingkat penganggurann suatu daerah maka akan berdampak terhadap kemiskinan di daerah tersebut. Tingginya penambahan jumlah angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan bertambahnya lapangan pekerjaan, berdampak pada peningkatan penganggurann. Dikarenakan sulit untuk bekerja, maka tidak adanya pendapatan membuat pemenuhan kebutuhan sulit, kekurangan nutrisi dan kesehatan, dan tak dapat memenuhi kebutuhan penting lainnya. sehingga akan menyebabkan tingkat kemiskinan di dalam kehidupan bermasyarakat akan meningkat (Itang, 2015).

Pulau Jawa masih menjadi pulau dengan penyumbang penduduk dengan status penganggurann terbesar di Indonesia. Hal ini tercermin dari gambar berikut ini:

**Gambar 1. 6. Persebaran Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Pulau
Tahun 2020 (Persen)**

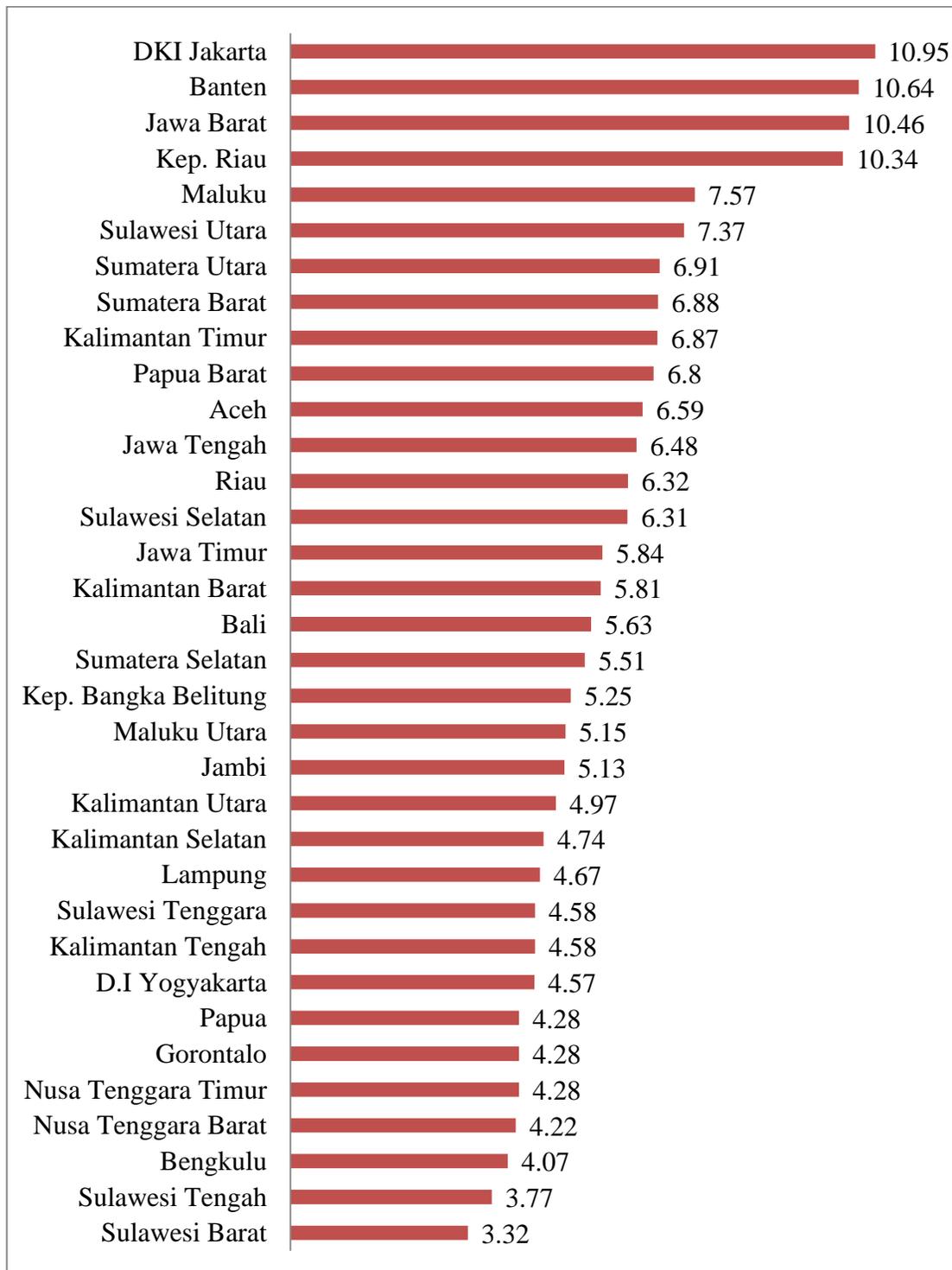


Sumber: BPS Statistik Nasional, 2021 (data diolah)

Gambar 1.6 diatas merupakan nilai rata-rata Tingkat Pengangguran Terbuka menurut Pulau pada tahun 2020. Terlihat bahwa pulau dengan penduduk penganggur terbesar adalah Pulau Jawa yaitu sebesar 8,16%. Kemudian Pulau Sumatera dengan TPT sebesar 6.17%, Pulau Maluku dan Papua dengan TPT sebesar 5.95%, Pulau Kalimantan dengan TPT sebesar 5,39%, selanjutnya Pulau Sulawesi dengan TPT sebesar 4,94% dan terakhir Pulau Bali dan Nusa Tenggara dengan nilai TPT sebesar 4,71%.

Lebih lanjut akan ditampilkan gambar terkait nilai Tingkat Pengangguran Terbuka menurut Provinsi pada tahun 2020.

**Gambar 1. 7. Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi
Tahun 2020 (Persen)**

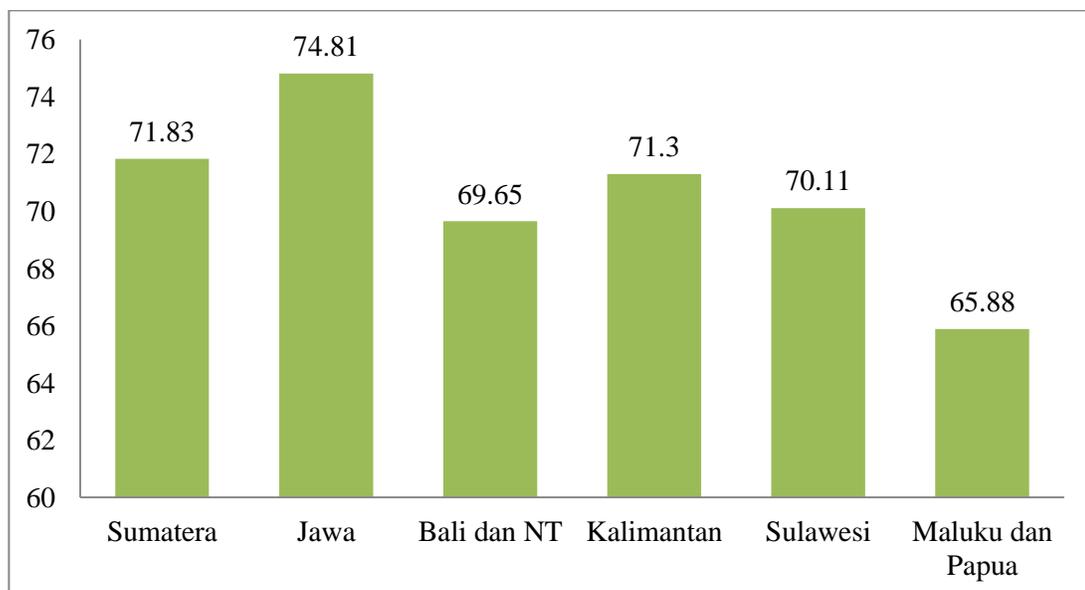


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021 (data diolah)

Dari Gambar 1.7 diatas, dapat diketahui bahwa dari 34 provinsi di Indonesia, terdapat tiga provinsi dari Pulau Jawa dengan nilai Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tertinggi secara nasional.

Selanjutnya, kualitas sumber daya manusia juga dapat menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya penduduk miskin. Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari indeks kualitas hidup/indeks pembangunan manusia (IPM). Rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) akan berakibat pada rendahnya produktivitas kerja dari penduduk. Produktivitas yang rendah berakibat pada rendahnya perolehan pendapatan. Sehingga dengan rendahnya pendapatan menyebabkan tingginya jumlah penduduk miskin (Sayifullah dan Gandasari, 2016). Berikut merupakan peringkat IPM menurut Pulau tahun 2020.

**Gambar 1. 8. Persebaran Indeks Pembangunan Manusia
Menurut Pulau Tahun 2020**

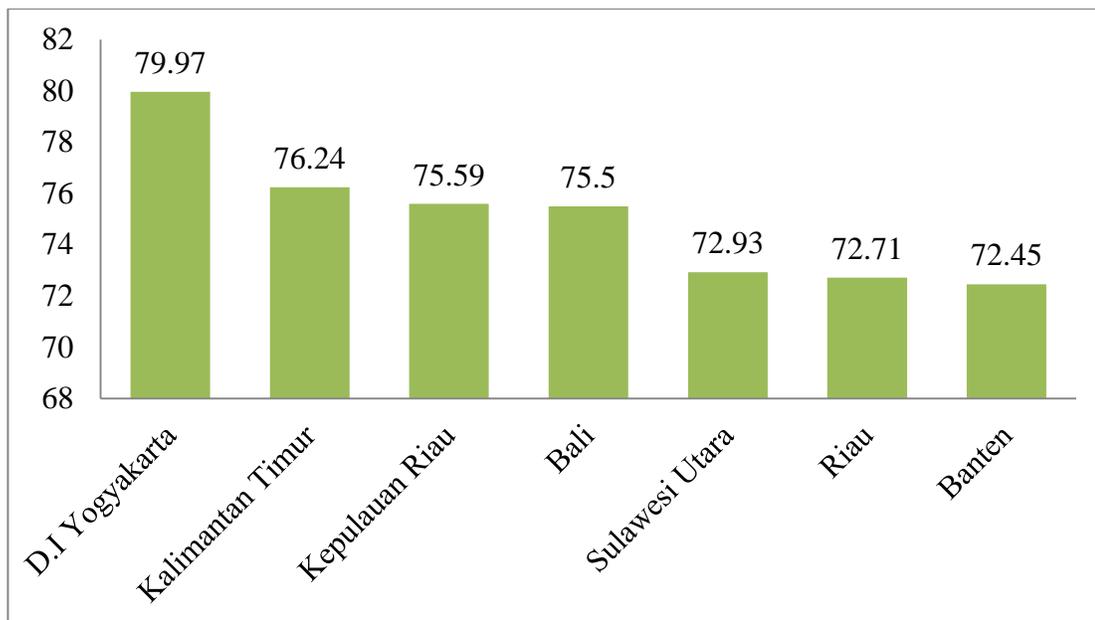


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021 (data diolah)

Dari gambar diatas dapat diketahui bahwa pulau dengan Indeks Pembangunan tertinggi sampai terendah adalah Pulau Jawa yaitu sebesar 74,81; Pulau Sumatera sebesar 71,83; Pulau Kalimantan sebesar 71,3; Pulau Sulawesi sebesar 70,11; Pulau Bali dan Nusa Tenggara sebesar 69,65; dan terakhir Pulau Maluku dan Papua dengan IPM sebesar 65,88.

Lebih lanjut akan ditampilkan 8 Provinsi dengan IPM di atas rerata nasional pada tahun 2020, dimana dua Provinsi yang ada di Pulau Jawa menempati posisi teratas peringkat Nasional.

Gambar 1. 9. Provinsi dengan Indeks Pembangunan Manusia Tertinggi Tahun 2020



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021 (data diolah)

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KEMISKINAN DI PULAU JAWA”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian diatas perlu diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Pulau Jawa. Beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan di Pulau Jawa periode 2011-2020?
2. Apakah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan di Pulau Jawa periode 2011-2020?
3. Apakah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan di Pulau Jawa periode 2011-2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Kemiskinan di Pulau Jawa periode 2011-2020.
2. Untuk menganalisis pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terhadap Tingkat Kemiskinan di Pulau Jawa periode 2011-2020.
3. Untuk menganalisis pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Tingkat Kemiskinan di Pulau Jawa periode 2011-2020.

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan yang ada di Pulau Jawa, dimana beberapa faktor yang diteliti antara lain pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia dan tingkat pengangguran terbuka di masing-masing Provinsi yang ada di Pulau Jawa pada periode tahun 2011-2020.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah. Baik dari masalah kebijakan yang diambil maupun hanya sebagai tambahan informasi yang berguna di dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan sehingga dapat diketahui faktor-faktor yang perlu dipacu untuk penyelesaian masalah kemiskinan.
2. Dapat menjadi literatur tambahan atas ilmu pengetahuan dan penelitian yang akan datang, serta memberikan manfaat bagi yang membacanya.